

BAB I

PENDAHULUAN

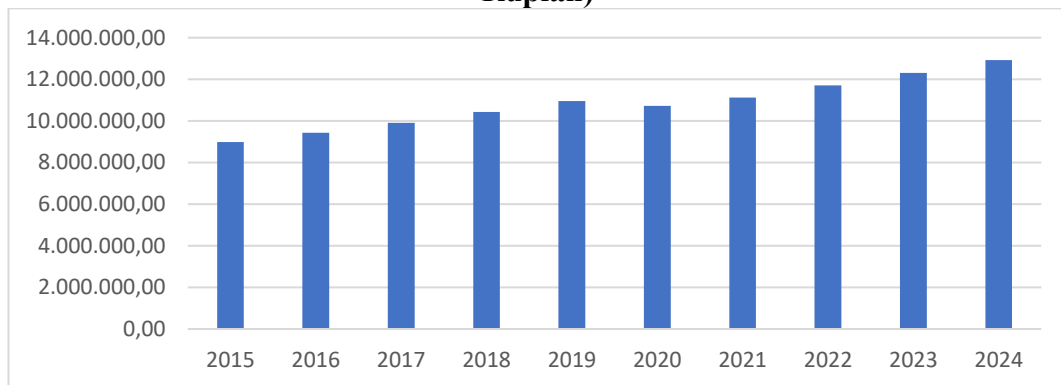
1.1. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi dipahami sebagai salah satu proses penting yang ada untuk mengukur tingkat kemajuan suatu daerah karena berhubungan langsung dengan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya secara menyeluruh. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah tercermin dari perkembangan sektor ekonomi yang mampu menjangkau berbagai elemen dan aktivitas di wilayah ini. Proses pembangunan ekonomi selain melibatkan peran aktif pemerintah juga melibatkan sektor swasta dan masyarakat untuk saling mendukung dalam menggerakkan kegiatan ekonomi (Hakim dan Umar, 2025). Kolaborasi berbagai pihak ini mendorong terbentuknya struktur ekonomi yang lebih produktif serta berdaya saing. Orientasi akhirnya diarahkan pada terwujudnya kesejahteraan masyarakat dengan dukungan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Tren pembangunan di Indonesia secara konsisten menunjukkan capaian yang relatif positif dari tahun ke tahun. Ekspansi ekonomi berskala nasional ini sering kali direpresentasikan sebagai indikator utama keberhasilan dalam mengelola sumber daya produktif secara agregat (Pratama dan Rohima, 2026). Meskipun demikian, realitas empiris memperlihatkan suatu kondisi di mana pencapaian tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh distribusi hasil pembangunan yang proporsional di tengah masyarakat (Syafitri, dkk., 2025). Kondisi ini menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu menjamin pemerataan, sehingga laju ekspansi yang tidak inklusif justru berisiko memperlebar

kesenjangan. Oleh karena itu, penuntasan masalah disparitas pendapatan antarwilayah maupun antarkelompok masyarakat hingga kini tetap menjadi tantangan mendasar dalam proses pembangunan nasional Indonesia (Sugiasuti dan Pratama, 2022).

Gambar 1. 1 PDB Indonesia Atas Dasar Harga Konstan 2015-2024 (Milyar Rupiah)

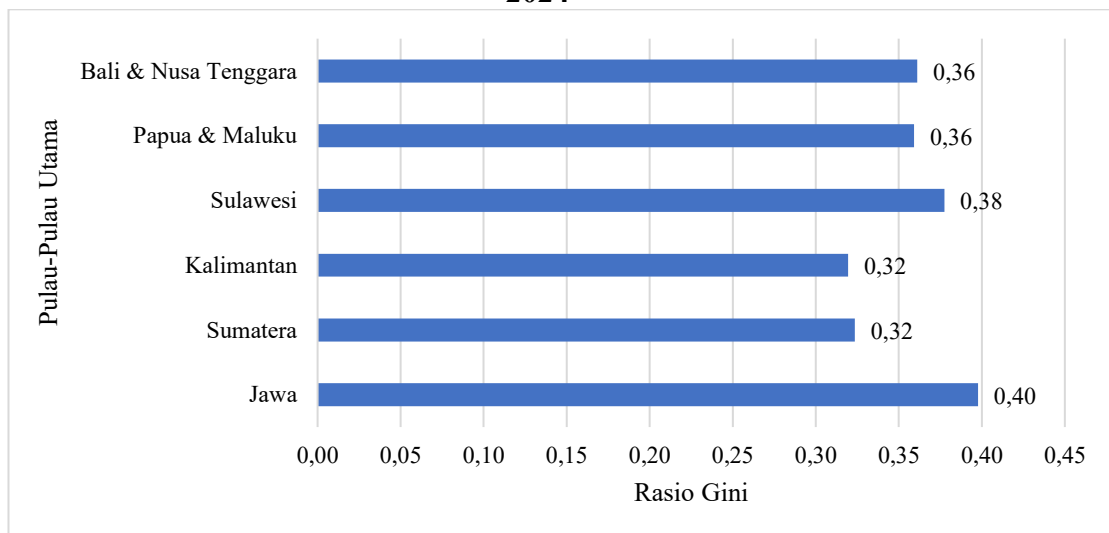


sumber: Badan Pusat Statistik data diolah

Gambaran tantangan pemerataan ini tampak jelas pada perkembangan indikator makroekonomi Indonesia. Produk Domestik Bruto (PDB) nasional relatif terjadi peningkatan pada 10 tahun terakhir, tetapi hasil pembangunan belum terdistribusi secara merata, yang tercermin dari masih tingginya rasio gini sebagai indikator ketidaksetaraan pendapatan antarkelompok masyarakat. Disparitas ini berkaitan dengan sejumlah konsekuensi sosial-ekonomi antara lain naiknya tingkat kemiskinan dan menguatnya kecemburuan sosial, serta berkurangnya stabilitas ekonomi. Dalam kajian Todaro dan Smith (dalam Julihanza dan Khoirudin, 2023) mengenai teori disparitas, pertumbuhan ekonomi yang tinggi dipandang tidak cukup apabila tidak disertai pemerataan hasil pembangunan, sehingga output pembangunan belum sepenuhnya terkonsolidasi menjadi manfaat nyata yang dirasakan secara luas oleh masyarakat.

Pada tataran empiris, stabilitas pertumbuhan ekonomi Indonesia belum sepenuhnya searah dengan kondisi disparitas pendapatan yang masih terlihat. Validasi kuantitatifnya ditunjukkan oleh data *Gini Ratio* Indonesia yang pada Maret 2025 ada di angka 0,375 (BPS, 2025). Nilai ini mencerminkan tingkat disparitas sedang (*moderate inequality*), suatu kondisi yang masih menjadi penghalang bagi terwujudnya pembangunan yang lebih inklusif. Situasi ini menandakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat belum sepenuhnya mampu mengoreksi kesenjangan distribusi pendapatan. Jika proses pemerataan pendapatan terus berlangsung lamban, Indonesia berisiko menghadapi stagnasi pembangunan, yang pada gilirannya bisa memperdalam kesenjangan sosial-ekonomi dan menghambat terwujudnya kesejahteraan yang inklusif bagi semua lapisan masyarakat.

Gambar 1. 2 Rata-Rata Rasio Gini di Indonesia Antarpulau Utama 2015-2024



sumber: Badan Pusat Statistik data diolah

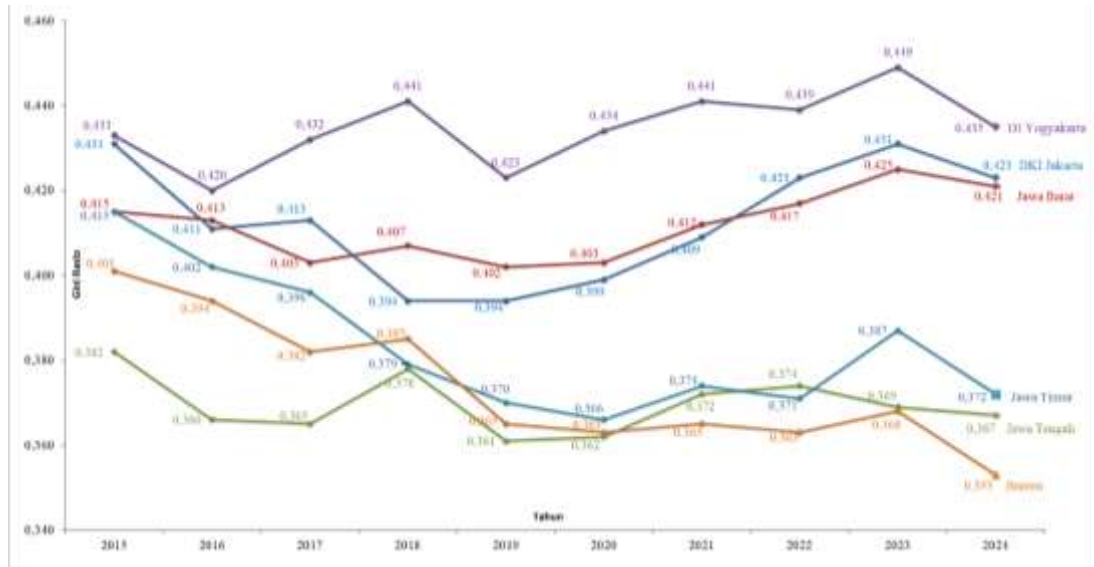
Sebagai dasar visualisasi dari tantangan disparitas makro regional tersebut, data rata-rata pada gambar 1.2 menunjukkan adanya pola disparitas yang nyata. Pulau Jawa secara konsisten menempati posisi teratas dengan angka indeks sebesar

0,40, disusul oleh Pulau Sulawesi di peringkat kedua sebesar 0,38. Kedua klaster pulau utama ini terbukti bergerak melampaui batas agregat ketimpangan nasional yang berada pada level 0,375 (BPS, 2025). Sebaliknya, wilayah Bali & Nusa Tenggara serta Papua & Maluku berada sedikit di bawah rata-rata nasional dengan angka stabil pada level 0,36, sementara tingkat pemerataan pendapatan relatif lebih baik tecermin di Pulau Sumatera dan Kalimantan yang mencatatkan indeks terendah sebesar 0,32. Realitas empiris ini memberikan justifikasi kuat bahwa Pulau Jawa yang memegang peranan vital dalam mendorong output makro justru menghadapi hambatan distribusi pendapatan antarmasyarakat yang paling tidak merata.

Berangkat dari penggambaran data antarpulau tersebut, pembongkaran dinamika internal di dalam Pulau Jawa menjadi krusial karena wilayah ini menempati posisi sebagai episentrum perekonomian nasional sekaligus kawasan dengan tingkat disparitas yang kontras. Badan Pusat Statistik (2025) memberi suatu petunjuk bahwa sekitar 57,02 persen perekonomian Indonesia di tahun 2024 disumbang oleh provinsi-provinsi di Pulau Jawa, dengan DKI Jakarta berkisar 16,71 persen, Jawa Timur berkisar 14,39 persen, Jawa Barat berkisar 12,82 persen dan Jawa Tengah berkisar 8,25 persen sebagai kontributor utama PDRB nasional. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Hapsari dan Arif (2022), ditemukan bahwa pada tahun 2019 PDRB provinsi tertinggi dimiliki oleh DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Jawa Barat, sementara provinsi dengan PDRB paling rendah adalah DI Yogyakarta. Ketimpangan sektoral ini menggambarkan adanya kesenjangan skala aktivitas ekonomi yang cukup tajam antarprovinsi, yang pada gilirannya

menjadikan Pulau Jawa mempunyai variasi kapasitas ekonomi antardaerah sangat lebar.

Gambar 1. 3 Perkembangan Gini Rasio Provinsi-Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2015–2024



sumber: Badan Pusat Statistik data diolah

Merujuk pada Gambar 1.3 yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (2025), dinamika disparitas antarprovinsi di Pulau Jawa pada rentang 2015–2024 memberi suatu petunjuk pola penurunan yang cukup nyata pada fase pra-pandemi periode 2015–2019. Nilai gini rasio DKI Jakarta turun dari 0,431 di tahun 2015 menjadi 0,394 di tahun 2019, Jawa Barat dari 0,415 menjadi 0,402, Jawa Timur dari 0,402 menjadi 0,370, Jawa Tengah dari 0,382 menjadi 0,361, serta Banten dari 0,401 menjadi 0,365. DI Yogyakarta tetap menjadi provinsi dengan tingkat disparitas tertinggi, yakni 0,433 pada 2015 dan sempat meningkat hingga 0,441 pada 2018 sebelum menurun ke 0,423 pada 2019. Pola ini bersinergi pada temuan Attala (2022) yang memberi suatu petunjuk bahwa disparitas pendapatan antarprovinsi di Pulau Jawa pada waktu periode pra-pandemi cenderung ada di

kategori disparitas sedang, dengan DI Yogyakarta konsisten ada di posisi tertinggi dan Jawa Tengah pada posisi relatif yang paling rendah.

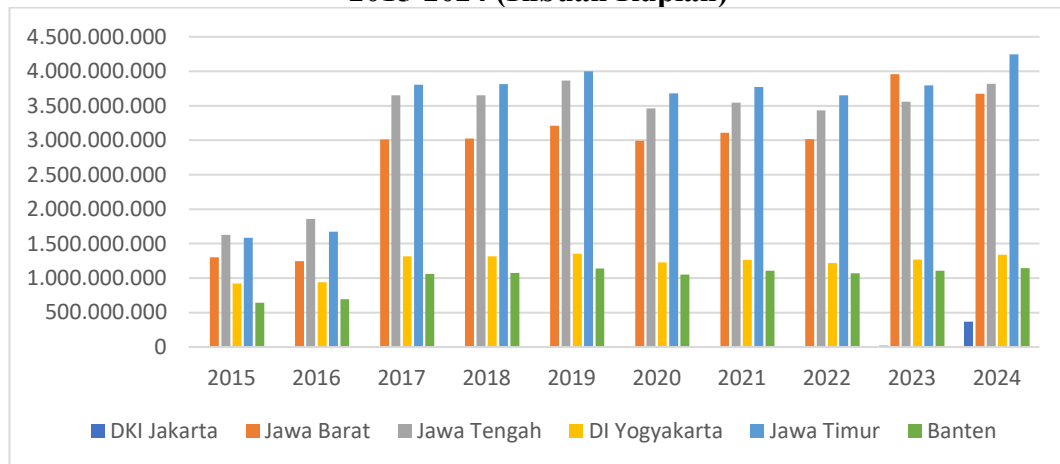
Memasuki masa pandemi COVID-19 di tahun 2020–2021, kecenderungan penurunan disparitas ini mulai berbalik arah. Gambar 2 memperlihatkan kenaikan kembali gini rasio di sebagian besar provinsi, misalnya DKI Jakarta yang meningkat dari 0,399 pada 2020 menjadi 0,409 pada 2021, Jawa Barat dari 0,403 menjadi 0,412, DI Yogyakarta dari 0,434 menjadi 0,441, serta Jawa Timur dari 0,366–0,370 menjadi 0,372. Perubahan ini mencerminkan guncangan yang terjadi pada struktur perekonomian, terutama pada penurunan permintaan tenaga kerja, peningkatan pengangguran dan pergeseran pekerja ke sektor informal. Indayani dan Hartono (2020) memberi suatu petunjuk bahwa perlambatan pertumbuhan ekonomi dan lonjakan pengangguran pada waktu pandemi berkontribusi terhadap peningkatan disparitas pendapatan di Indonesia, sementara Dinata (2021) menegaskan bahwa guncangan pandemi mengganggu distribusi pendapatan rumah tangga dan memperlebar kesenjangan di berbagai kelompok masyarakat.

Pada waktu periode pemulihan 2022–2024, disparitas pendapatan antarprovinsi di Pulau Jawa tidak langsung kembali ke tren penurunan stabil, melainkan tetap berfluktuasi pada level sedang. DKI Jakarta mencatat rasio gini 0,431 pada 2023 sebelum turun ke 0,423 pada 2024, Jawa Barat naik menjadi 0,425 pada 2023 lalu menurun ke 0,421, sementara DI Yogyakarta mencapai 0,449 pada 2023 dan terkoreksi ke 0,435 pada 2024. Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Banten berfluktuasi di kisaran 0,35–0,38, dengan disparitas relatif lebih rendah daripada DKI Jakarta, Jawa Barat, serta DI Yogyakarta. Pola ini sesuai pada temuan empiris bahwa disparitas antarwilayah di Indonesia dipengaruhi oleh

ketidakmerataan infrastruktur, perbedaan kualitas SDM dan konsentrasi sumber daya ekonomi di wilayah tertentu (Oksamulya dan Anis, 2020). Temuan lain menyebutkan bahwa variasi sumber daya dan kondisi demografis antardaerah menyebabkan perbedaan kemampuan pembangunan, sehingga timbul daerah maju dan tertinggal (Farrah dan Yuliadi, 2020). Kombinasi penurunan disparitas pra-pandemi, lonjakan saat pandemi, serta fluktuasi pasca-pandemi mengindikasikan perubahan struktural pada permintaan tenaga kerja dan distribusi pendapatan, membuat periode 2015–2024 relevan untuk menganalisis dinamika disparitas antarprovinsi di Pulau Jawa.

Dana Alokasi Umum (DAU) diduga menjadi salah satu faktor penentu disparitas distribusi pendapatan antarwilayah. DAU bersumber dari APBN yang dialihkan pemerintah pusat ke daerah otonom sebagai dana perimbangan, sehingga bisa digunakan fleksibel untuk belanja umum yang mendukung pembangunan dan layanan publik (Hepi dan Ajidin, 2025). Alokasi DAU didasarkan pada perhitungan celah fiskal yang merepresentasikan jarak antara kebutuhan fiskal dan daya dukung fiskal daerah. Celah yang lebih lebar membuat daerah pendapatan lebih rendah mendapat porsi alokasi yang lebih besar (Kementerian Keuangan RI, 2021). Karakteristik ini membuat DAU mencerminkan kapasitas keuangan daerah dalam menyediakan layanan publik, infrastruktur dan program peningkatan kualitas hidup masyarakat. Penelitian Ridho dan Wijayanti (2022) menemukan bahwa variasi alokasi DAU antarprovinsi berkaitan dengan kemampuan pembiayaan layanan publik dan berpotensi memengaruhi disparitas pendapatan antarwilayah di Indonesia. Temuan ini memperkuat pemilihan DAU pada variabel yang diduga punya pengaruh terhadap disparitas pendapatan di provinsi-provinsi Pulau Jawa.

Gambar 1. 4 Dana Alokasi Umum Provinsi-Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2015-2024 (Ribuan Rupiah)



sumber: LKPP Kementerian Keuangan RI data diolah

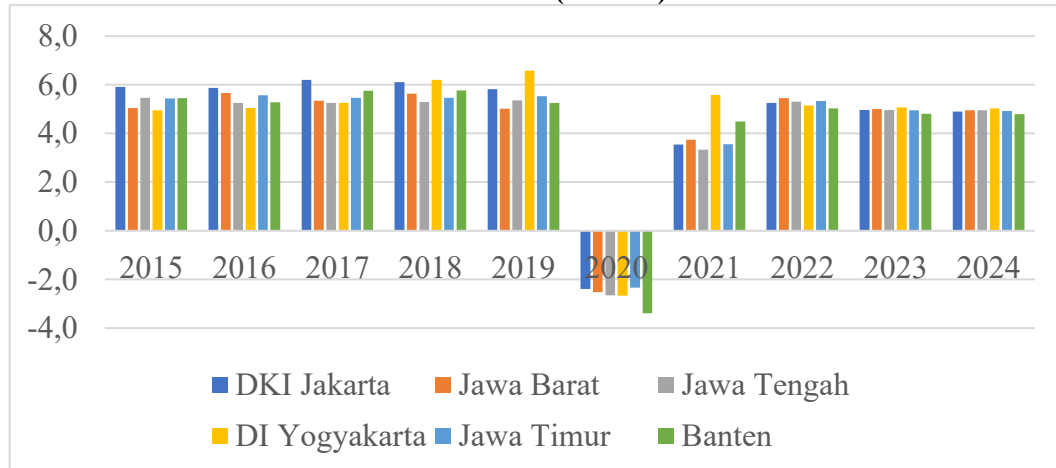
Data Dana Alokasi Umum (DAU) provinsi-provinsi di Pulau Jawa periode 2015–2024 memberi suatu petunjuk variasi antarwilayah yang tidak seragam. Pada fase pra pandemi DAU cenderung meningkat dan penguatan terlihat sejak 2017, di mana Jawa Timur dan Jawa Tengah konsisten menjadi penerima tertinggi, lalu disusul Jawa Barat yang juga mengalami kenaikan cukup besar, sementara DI Yogyakarta dan Banten menerima alokasi lebih kecil. Pada masa pandemi, kelima provinsi penerima tetap mengalami penurunan pada 2020 dan kemudian pulih secara bertahap pada 2021 yang memberi suatu petunjuk adanya tekanan fiskal pada waktu periode krisis. Pada fase pasca pandemi, alokasi kembali menguat terutama pada 2023–2024, dengan Jawa Timur mencapai sekitar 4,25 triliun rupiah dan Jawa Tengah sekitar 3,82 triliun rupiah pada 2024, Jawa Barat melonjak pada 2023 dan tetap tinggi pada 2024, sementara DI Yogyakarta dan Banten relatif stabil di kisaran 0,9–1,3 triliun rupiah. Berbeda dari provinsi lain, DKI Jakarta tidak menerima DAU hingga 2022, lalu mulai menerima pada 2023 dan meningkat tajam pada 2024 sehingga pola alokasinya paling berbeda dan memperlihatkan adanya perbedaan ruang fiskal antarprovinsi di Pulau Jawa.

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan instrumen proksi guna memotret ketimpangan fiskal antarprovinsi, yang berimplikasi langsung pada perbedaan kapasitas daerah dalam mendorong kesejahteraan masyarakat. Ketidakeimbangan alokasi DAU mengisyaratkan adanya perbedaan ruang fiskal sehingga sebagian daerah mempunyai kapasitas belanja publik lebih besar dibanding wilayah lain, yang berpotensi mempertahankan kesenjangan kesejahteraan. Teori federalisme fiskal memberi penjelasan bahwa terdapat tiga fungsi pemerintah terdiri atas fungsi alokasi, distribusi dan stabilisasi. Jika distribusi dan stabilitasi adalah kewenangan pemerintah pusat, maka berbeda untuk fungsi alokasi. Fungsi ini selaras dengan prinsip desentralisasi yang menekankan transfer sebagian otoritas pemerintahan dari level pusat ke level daerah (Chandra, 2012). Saat kewenangan penyediaan layanan lebih banyak berada di tangan pemerintah daerah ini, intervensi bisa diarahkan secara lebih spesifik untuk mengurangi kesenjangan akses antarwilayah, sehingga peningkatan produktivitas dan kesempatan kerja dapat terjadi lebih merata.

Perbedaan kapasitas fiskal yang tercermin pada alokasi DAU bukan satu-satunya faktor yang berpotensi memengaruhi disparitas distribusi pendapatan antarwilayah. Pertumbuhan ekonomi yakni salah satu variabel makro yang berperan dalam memberi penjelasan dinamika disparitas distribusi pendapatan antarwilayah. Pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai suatu proses dinamis yang menggambarkan ekspansi berkelanjutan pada kemampuan produksi suatu negara dalam periode waktu tertentu (Fauziah, 2025). Menurut Kuznets, pertumbuhan di tahap awal pembangunan cenderung memperlebar ketimpangan, tetapi di tahap lanjut ketimpangan menurun seiring transformasi struktur ekonomi dan meluasnya

kesempatan kerja sehingga hubungan ini membentuk pola U-terbalik (Iqbal dan Woyanti, 2025).

Gambar 1. 5 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi-Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2015-2024 (Persen)



sumber: Badan Pusat Statistik data diolah

Data pertumbuhan ekonomi antarprovinsi di Pulau Jawa tahun 2015–2024 memberi suatu petunjuk dinamika yang tidak sepenuhnya seragam. Pada periode sebelum pandemi, pertumbuhan di semua provinsi relatif stabil di kisaran 5–6 persen dengan DKI Jakarta mencatat angka tertinggi 6,20 persen pada 2017 dan DI Yogyakarta mencapai 6,59 persen pada 2019. Tahun pandemi yakni 2020 menjadi titik balik ketika semua provinsi mengalami kontraksi, mulai dari Jawa Timur berkisar –2,33 persen hingga penurunan terdalam di Banten berkisar –3,39 persen. Pada 2021 sampai 2022 perekonomian daerah berangsur pulih, DI Yogyakarta kembali mencatat pertumbuhan tertinggi 5,58 persen pada 2021, sementara Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur kembali berada di kisaran 5 persen pada 2022. Memasuki 2023–2024, pertumbuhan di keenam provinsi cenderung konvergen di sekitar 4,8–5,1 persen, yang mencerminkan fase pemulihan dengan laju pertumbuhan yang lebih moderat dibanding masa sebelum pandemi.

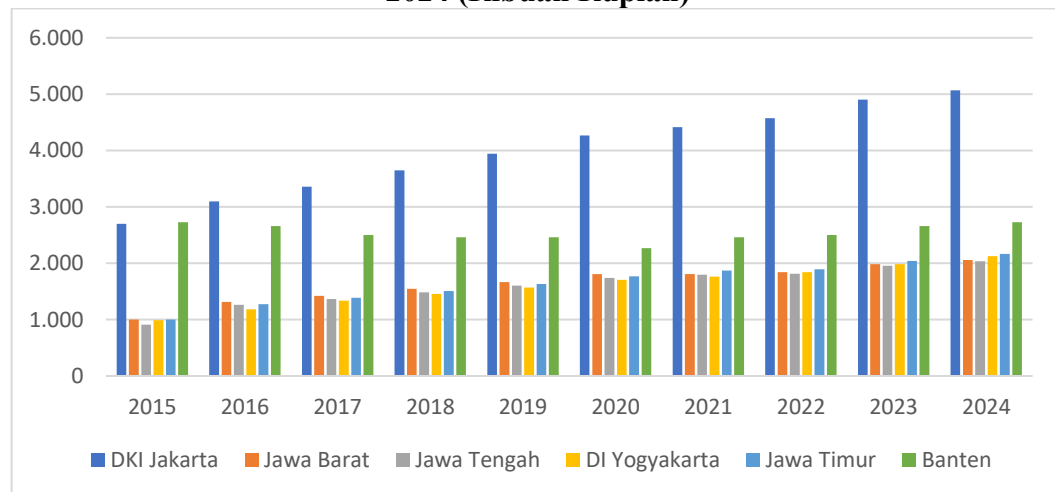
Perbedaan pola pertumbuhan ini menggambarkan bahwa kapasitas masing-masing provinsi di Pulau Jawa dalam mengakselerasi aktivitas ekonomi tidak seragam. Provinsi yang mampu menjaga atau memulihkan pertumbuhan pada level yang lebih tinggi mempunyai ruang yang lebih besar untuk memperluas penyerapan tenaga kerja dan mendorong kenaikan pendapatan masyarakat. Salah satu studi tentang ketimpangan pendapatan antarprovinsi di Pulau Jawa menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tidak seragam antarprovinsi yakni salah satu pemicu utamanya (Riyanti dan Karimi, 2022). Temuan ini mendapat penguatan dari Ridho dan Wijayanti (2022), yang secara empiris memberi suatu petunjuk yakni pertumbuhan ekonomi punya pengaruh signifikan pada ketimpangan pendapatan di Indonesia. Dalam kerangka analisis disparitas, variasi pertumbuhan ekonomi ini menjadi penting karena menentukan seberapa besar ruang yang dimiliki masing-masing daerah untuk mengurangi disparitas distribusi pendapatan pada penciptaan aktivitas ekonomi yang produktif.

Selain perbedaan laju pertumbuhan ekonomi, disparitas distribusi pendapatan antardaerah juga dipengaruhi oleh kondisi pasar kerja dan kebijakan pengupahan. Upah Minimum Provinsi (UMP) menjadi indikator kunci yang mencerminkan batas bawah pendapatan pekerja formal di suatu wilayah. UMP berfungsi sebagai instrumen kebijakan yang mewajibkan pengusaha membayar upah minimum kepada pekerja, sehingga melindungi kelompok pendapatan rendah sekaligus memengaruhi pola distribusi pendapatan regional (Faruddin dan Djamaluddin, 2025).

Perspektif neoklasik memposisikan upah sebagai hasil mekanisme pasar, yakni ditentukan ketika permintaan tenaga kerja bertemu dengan penawarannya

pada kondisi keseimbangan. Apabila upah minimum ditetapkan lebih tinggi daripada tingkat keseimbangan ini, akan timbul kelebihan penawaran tenaga kerja yang mengakibatkan peningkatan pengangguran (Hamsyiah, Wibowo dan Hardianti, 2025). Pengangguran yang lebih tinggi ini pada gilirannya turut memperlebar kesenjangan pendapatan di wilayah terkait. Temuan empiris mendukung argumen ini, sebagaimana ditunjukkan dalam kajian Helmy, Nujum dan Selong (2024) yang memasukkan UMP sebagai salah satu variabel penentu dan memberi pernyataan yakni UMP mempunyai pengaruh signifikan pada disparitas pendapatan di Provinsi Sulawesi Selatan.

Gambar 1. 6 Upah Minimum Provinsi-Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2015-2024 (Ribuan Rupiah)



sumber: Badan Pusat Statistik data diolah

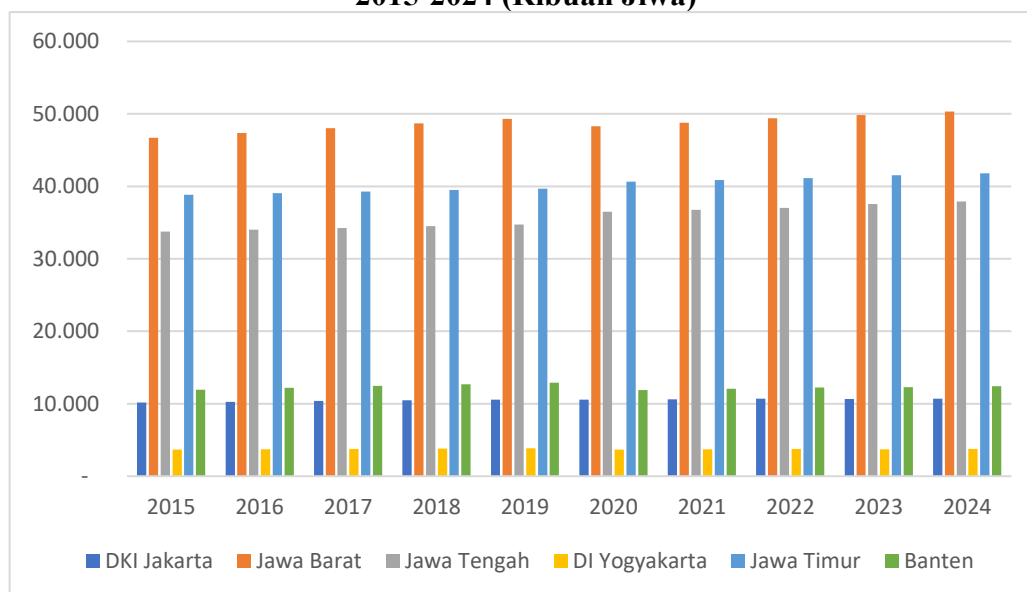
UMP di provinsi-provinsi Pulau Jawa sepanjang 2015–2024 memperlihatkan struktur upah minimum yang bertingkat dan tetap timpang antarwilayah. Terlihat di tahun-tahun sebelum pandemi, kenaikan UMP umumnya berlangsung bertahap dengan DKI Jakarta konsisten sebagai yang tertinggi dari sekitar Rp2,7 juta menjadi Rp3,94 juta, sementara Jawa Tengah dan DI Yogyakarta ada di kelompok yang paling rendah yang masih sekitar Rp1,57–1,61 juta pada

2019, sementara Jawa Barat dan Jawa Timur menempati kelompok menengah dan Banten relatif tinggi namun mulai cenderung stagnan di akhir 2019. Saat pandemi 2020–2021 penyesuaian UMP terlihat lebih tertahan dan tidak merata, ditunjukkan oleh Jawa Barat yang tidak naik pada 2021 dan Banten yang turun pada 2020 sebelum kembali meningkat pada 2021, sementara provinsi lain tetap naik. Memasuki fase pasca pandemi 2022–2024, kenaikan kembali lebih konsisten di hampir semua provinsi hingga 2024, ketika DKI Jakarta sudah melampaui Rp5 juta, Jawa Barat dan Jawa Tengah berada sekitar Rp2,06 juta dan Rp2,04 juta, DI Yogyakarta dan Jawa Timur sekitar Rp2,13 juta dan Rp2,17 juta, serta Banten sekitar Rp2,73 juta, sehingga perbedaan batas bawah upah ini tetap berimplikasi pada ketidaksamaan daya beli dan standar minimum kesejahteraan pekerja formal antarprovinsi di Pulau Jawa.

Faktor lain yang berkaitan dengan disparitas pendapatan adalah dinamika jumlah penduduk dan tekanan demografis yang ditimbulkannya. Teori jebakan penduduk Malthus memberi penjelasan bahwa pertumbuhan penduduk yang lebih cepat dibanding pertumbuhan kapasitas produksi akan menekan ketersediaan sumber daya per kapita, menurunkan produktivitas dan pada akhirnya menahan kenaikan pendapatan per kapita (Raharto, 2020). Dalam kondisi populasi besar dengan lapangan kerja produktif terbatas, kelebihan pasokan tenaga kerja menekan upah tetap rendah, meningkatkan kerentanan penduduk miskin terhadap guncangan ekonomi, serta memperlebar kesenjangan diantara kelompok berakses aset, pendidikan dan pekerjaan formal layak dengan kelompok bergantung pada sektor informal berproduktivitas rendah. Hal ini didukung oleh temuan empiris yakni

jumlah penduduk punya pengaruh signifikan pada disparitas distribusi pendapatan di Kawasan urban Provinsi Aceh (Suci dan Srinita, 2025).

Gambar 1. 7 Jumlah Penduduk Provinsi-Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2015-2024 (Ribuan Jiwa)



sumber: Badan Pusat Statistik data diolah

Data jumlah penduduk antarprovinsi di Pulau Jawa tahun 2015–2024 memberi suatu petunjuk konsentrasi populasi yang sangat besar di Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Sebelum pandemi melanda, hampir semua provinsi mencatat pertumbuhan yang cukup stabil dengan Jawa Barat naik dari 46,71 juta menjadi 49,32 juta jiwa, Jawa Timur dari 38,85 juta menjadi 39,70 juta jiwa, dan Jawa Tengah dari 33,77 juta menjadi 34,72 juta jiwa, sementara DI Yogyakarta tumbuh lebih lambat dibanding yang lain. Ketika pandemi berlangsung, pola pertumbuhan berubah drastis dan cenderung fluktuatif karena beberapa provinsi seperti Jawa Barat, Banten dan DI Yogyakarta justru mengalami penurunan jumlah penduduk di 2020, sementara Jawa Tengah dan Jawa Timur masih bertambah, baru kemudian semua provinsi kembali naik di 2021. Sesudah pandemi mereda, tren pertumbuhan kembali memberi suatu petunjuk konsistensi yang lebih baik hingga

di 2024 Jawa Barat mencapai sekitar 50,35 juta jiwa, diikuti Jawa Timur 41,82 juta jiwa dan Jawa Tengah 37,89 juta jiwa, sementara DKI Jakarta tercatat 10,69 juta jiwa, Banten 12,43 juta jiwa dan DI Yogyakarta 3,76 juta jiwa. Besarnya konsentrasi penduduk di provinsi-provinsi di Pulau Jawa mencerminkan tekanan demografis yang lebih besar dan berpotensi memperlebar ketimpangan pendapatan karena peningkatan penduduk tidak selalu diikuti penciptaan kerja dan produktivitas yang sebanding.

Berbagai penelitian terdahulu memberi suatu petunjuk hasil yang belum konsisten terkait faktor-faktor penentu disparitas pendapatan. Dana Alokasi Umum (DAU) ditemukan punya pengaruh positif serta signifikan pada disparitas dalam studi Jamiel, dkk. (2022) dan Sari (2025), sementara Ridho dan Wijayanti (2022) justru menemukan pengaruh DAU yang negatif serta signifikan pada disparitas pendapatan. Variabel pertumbuhan ekonomi juga belum memberi suatu petunjuk pola yang seragam, karena terdapat penelitian yang memberi pernyataan tidak punya pengaruh signifikan pada disparitas (Helmy, Nujum dan Selong, 2024; Suryani dan Woyanti, 2021; Saputro, 2018), sementara studi lain menemukan pengaruh yang signifikan dengan arah yang berbeda, misalnya Ridho dan Wijayanti (2022) menemukan pengaruh positif serta signifikan, sementara Panggabean (2025) menemukan pengaruh negatif serta signifikan pada ketimpangan pendapatan.

Hasil kajian terhadap upah minimum menunjukkan divergensi yang nyata, sebagaimana terefleksi dalam kajian empiris Helmy, Nujum dan Selong (2024) mengutarakan bahwa upah minimum punya pengaruh positif serta signifikan pada disparitas di Sulawesi Selatan dan DI Yogyakarta, tetapi pada analisis semua provinsi di Indonesia oleh Anshari, Azhar dan Ariusni (2018) punya pengaruh

negatif serta signifikan. Panggabean (2025) juga menemukan UMP punya pengaruh negatif namun tidak signifikan pada ketimpangan pendapatan di Indonesia. Jumlah penduduk sebagai indikator tekanan demografis mulai dikaji dan ditemukan punya pengaruh positif serta signifikan pada disparitas di beberapa wilayah (Suci dan Srinita, 2025), sementara menurut temuan Duarsa dan Wijaya (2023) memberi suatu petunjuk pengaruh negatif serta signifikan pada disparitas distribusi pendapatan, namun ada pula yang tidak mempunyai pengaruh signifikan pada disparitas pendapatan pada 38 kabupaten/kota di Jawa Timur (Saputro, 2018). Pola hasil yang saling berbeda baik dari sisi arah koefisien maupun signifikansinya menandakan perlunya penelitian lanjutan yang secara khusus menganalisis pengaruh DAU, pertumbuhan ekonomi, UMP dan jumlah penduduk terhadap disparitas pendapatan antarprovinsi di Pulau Jawa periode 2015–2024.

Kondisi ini makin urgen dikaji pada wilayah Pulau Jawa, karena kawasan ini menjadi episentrum perekonomian nasional dengan kontribusi PDRB terbesar sekaligus masih ada di tingkat disparitas kategori sedang. Penelitian terdahulu umumnya berfokus pada level nasional, provinsi tunggal atau menggunakan kombinasi variabel yang berbeda, sehingga kajian yang secara bersamaan menganalisis pengaruh DAU, pertumbuhan ekonomi, UMP dan jumlah penduduk terhadap disparitas pendapatan antarprovinsi di Pulau Jawa masih sangat terbatas.

Penelitian ini mempunyai keterbaruan karena menggunakan data panel antarprovinsi di Pulau Jawa periode 2015–2024 yang mencakup fase pra-pandemi, masa pandemi dan periode pemulihan sehingga bisa menggambarkan dinamika disparitas secara lebih komprehensif. Selain ini, penelitian ini memberikan keterbaruan analitis dengan mengkaji secara simultan faktor fiskal (Dana Alokasi

Umum), faktor makro (pertumbuhan ekonomi), faktor pasar tenaga kerja (Upah Minimum Provinsi) dan faktor demografis (jumlah penduduk) dalam satu kerangka empiris yang terfokus pada disparitas antarprovinsi di Pulau Jawa, yang masih relatif terbatas pada penelitian sebelumnya.

Dengan meneliti **“Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum Provinsi, dan Jumlah Penduduk Terhadap Disparitas Pendapatan Antarprovinsi Di Pulau Jawa”**, bisa menjadi katalisator pengambilan keputusan bagi pengambil kebijakan dalam merumuskan kebijakan fiskal, pengupahan dan pengendalian tekanan demografis yang lebih inklusif. Hasilnya bisa dimanfaatkan perencana pembangunan untuk menyusun intervensi yang lebih tepat sasaran, sehingga upaya pengurangan disparitas pendapatan dapat berjalan seiring pada pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa.

1.2. Rumusan Masalah

Dengan menempatkan latar belakang sebagai pijakan analitis, rumusan masalah penelitian ini dirumuskan yaitu:

1. Apakah ada pengaruh antara Dana Alokasi Umum (DAU) dengan Disparitas Pendapatan Antarprovinsi di Pulau Jawa?
2. Apakah ada pengaruh antara Pertumbuhan Ekonomi dengan Disparitas Pendapatan Antarprovinsi di Pulau Jawa?
3. Apakah ada pengaruh antara Upah Minimum Provinsi (UMP) dengan Disparitas Pendapatan Antarprovinsi di Pulau Jawa?
4. Apakah ada pengaruh antara Jumlah Penduduk dengan Disparitas Pendapatan Antarprovinsi di Pulau Jawa?

1.3. Tujuan Penelitian

Dengan menjadikan latar belakang dan rumusan masalah sebagai pijakan, tujuan penelitian ini dinyatakan yaitu:

1. Untuk menganalisis pengaruh antara Dana Alokasi Umum (DAU) dengan Disparitas Pendapatan Antarprovinsi di Pulau Jawa.
2. Untuk menganalisis pengaruh antara Pertumbuhan Ekonomi dengan Disparitas Pendapatan Antarprovinsi di Pulau Jawa.
3. Untuk menganalisis pengaruh antara Upah Minimum Provinsi (UMP) dengan Disparitas Pendapatan Antarprovinsi di Pulau Jawa.
4. Untuk menganalisis pengaruh antara Jumlah Penduduk dengan Disparitas Pendapatan Antarprovinsi di Pulau Jawa.

1.4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari penelitian ini difokuskan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi disparitas pendapatan di Pulau Jawa. Variabel yang diteliti meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), laju pertumbuhan ekonomi, Upah Minimum Provinsi (UMP) dan jumlah penduduk pada variabel independen, serta Gini Rasio pada variabel dependen. Penelitian ini mencakup enam provinsi di Pulau Jawa, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur dan Banten, pada periode pengamatan tahun 2015–2024. Ruang lingkup ini dibatasi pada analisis hubungan antarvariabel ini dalam konteks disparitas pendapatan daerah, tanpa membahas determinan di luar variabel penelitian ataupun wilayah di luar Pulau Jawa.

1.5. Manfaat Penelitian

Penulis menempatkan penelitian ini sebagai kontribusi yang diharapkan berguna bagi pihak-pihak berikut:

1. Bagi pembaca, penelitian ini diproyeksikan mampu menjadi rujukan bagi studi lanjutan mengenai disparitas pendapatan, terutama kajian yang menelaah pengaruh Dana Alokasi Umum, pertumbuhan ekonomi, Upah Minimum Provinsi dan jumlah penduduk terhadap disparitas pendapatan antarprovinsi di Pulau Jawa.
2. Bagi pemangku kebijakan, penelitian ini diharapkan bisa memperkaya dasar pengambilan keputusan khususnya bagi Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas dan pemerintah daerah di Pulau Jawa dalam merumuskan kebijakan.
3. Bagi peneliti, penelitian ini menambah wawasan dan menghujamkan pemahaman mengenai pengaruh berbagai faktor terhadap disparitas pendapatan antarprovinsi di Pulau Jawa, sekaligus menjadi bagian dari pemenuhan persyaratan akademik untuk menyelesaikan studi dan mendapat gelar Sarjana Ekonomi di UPN “Veteran” Jawa Timur.
4. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan menambah khazanah literatur empiris di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN “Veteran” Jawa Timur, sekaligus menjadi rujukan untuk pengembangan kajian selanjutnya.